

PENGARUH DISINFORMASI POLITIK DI MEDIA SOSIAL TERHADAP KEPERCAYAAN PUBLIK KEPADA PEMERINTAH

(Studi Kasus Masyarakat Perempuan Desa Lampegan Kecamatan Ibum)

Wulan Sari Budi Astuti¹, Umi Narimawati², Wentri Merdiani³, Azis Zulficar Aly Yusca⁴

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Bisnis, Universitas Wanita Internasional

ARTICLE INFO

Article history:

Received Oktober 2026

Revised Oktober 2026

Accepted Oktober 2026

Available Oktober 2026

wulansariba895@gmail.com¹

uminarimawati01@gmail.com²

wentri@iwu.ac.id³

aziszulficar@iwu.ac.id⁴

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh disinformasi politik di media sosial terhadap kepercayaan publik kepada pemerintah pada masyarakat perempuan Desa Lampegan, Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 54 responden yang dipilih melalui teknik *simple random sampling*. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner berskala Likert dan dianalisis dengan statistik deskriptif serta regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disinformasi politik di media sosial berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kepercayaan publik kepada pemerintah, dengan nilai *t* hitung sebesar -2,849 dan signifikansi 0,006. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,135 menunjukkan bahwa disinformasi politik menjelaskan 13,5% variasi kepercayaan publik, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Penelitian ini menyimpulkan bahwa semakin tinggi paparan disinformasi politik, semakin rendah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan

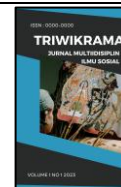
literasi digital, penguatan komunikasi publik pemerintah, serta pengembangan sistem verifikasi informasi yang efektif, khususnya di tingkat masyarakat pedesaan.

Kata kunci: Disinformasi Politik, Media Sosial, Kepercayaan Publik.

ABSTRACT

*This study aims to examine the effect of political disinformation on social media on public trust in the government among women in Lampegan Village, Ibum District, Bandung Regency. This study employed a quantitative approach using a survey method involving 54 respondents selected through simple random sampling. Data were collected using a Likert-scale questionnaire and analyzed using descriptive statistics and simple linear regression. The results indicate that political disinformation on social media has a significant negative effect on public trust in the government, with a *t*-value of -2.849 and a significance level of 0.006. The coefficient of determination (R^2) of 0.135 indicates that political disinformation explains 13.5% of the variation in public trust, while the remaining variation is influenced by other factors. The study concludes that the higher the exposure to political disinformation, the lower the public's trust in the government. Therefore, efforts are needed to improve digital literacy, strengthen government public communication, and develop effective information verification systems, particularly in rural communities.*

Keywords: Political Disinformation, Social Media, Public Trust.



1. PENDAHULUAN

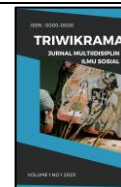
Kepercayaan publik kepada pemerintah merupakan bagian penting dalam membentuk sistem pemerintahan yang efektif dan demokratis. Namun, pada era digital, kepercayaan publik menghadapi tantangan akibat maraknya penyebaran informasi politik yang tidak akurat melalui media sosial. Qadir dan Ramli (2024) menjelaskan bahwa media sosial merupakan wadah komunikasi berbasis internet yang memungkinkan pengguna saling terhubung dan menyebarkan berbagai bentuk informasi secara dua arah dan *real-time*. Kemudahan tersebut juga membuka peluang penyebaran disinformasi politik, yaitu penyebaran informasi keliru atau menyesatkan secara sengaja untuk memengaruhi pandangan masyarakat (Nurdin, 2024). Kondisi ini dapat menurunkan kepercayaan publik kepada pemerintah, padahal kepercayaan merupakan unsur penting dalam menopang legitimasi pemerintahan (Ningsih dan Sasmita, 2025).

Penyebaran disinformasi politik melalui WhatsApp, Facebook, dan Instagram menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kebijakan, kinerja, serta informasi resmi pemerintah. Berdasarkan data MAFINDO dalam ANTARA (2025), terdapat 1.593 kasus hoaks yang ditemukan dalam satu tahun terakhir dan sebagian besar didominasi oleh isu politik (Mulya, 2025). Nugroho et al. (2024) juga menemukan bahwa hoaks dan disinformasi dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta memengaruhi penerimaan kebijakan publik. Berdasarkan data GoodStats (2025), aktor politik menjadi salah satu sumber utama penyebaran hoaks di media sosial (Yonatan, 2025). Dengan demikian, disinformasi politik tidak hanya memengaruhi cara masyarakat memahami informasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan penolakan terhadap kebijakan pemerintah dan menghambat pelaksanaan pelayanan publik.

Permasalahan tersebut juga relevan dengan kondisi masyarakat pedesaan, khususnya perempuan di Desa Lampegan, Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung. Meningkatnya penggunaan media sosial belum sepenuhnya diimbangi dengan kemampuan literasi digital yang memadai, sehingga masyarakat berpotensi menerima dan menyebarkan informasi politik tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Hasanah et al. (2025) menemukan adanya kesenjangan digital pada kelompok perempuan di Desa Lampegan, terutama dalam pemanfaatan media digital secara luas dan kritis. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan di Desa Lampegan berpotensi menghadapi kerentanan dalam menyaring informasi, termasuk disinformasi politik yang beredar di media sosial.

Urgensi penelitian ini juga didukung oleh kondisi kerawanan politik di Kabupaten Bandung. Bawaslu RI mencatat Kabupaten Bandung sebagai daerah dengan Indeks Kerawanan Pemilu tertinggi ketiga secara nasional dan tertinggi di Jawa Barat, dengan skor 91,59 (Detikcom, 2022). Bawaslu Provinsi Jawa Barat juga menetapkan Kabupaten Bandung sebagai salah satu wilayah dengan kerawanan tinggi terkait politik uang, isu SARA, dan kampanye hitam (Detikcom, 2023). Selain itu, pra-survei terhadap 23 perempuan Desa Lampegan pada Juni 2026 menunjukkan bahwa 82,6% responden pernah menerima informasi politik yang tidak jelas sumbernya melalui media sosial, 95,7% menyatakan informasi tersebut memengaruhi pandangan mereka terhadap kinerja pemerintah, dan 82,6% menyatakan kepercayaan mereka terhadap pemerintah menurun akibat informasi negatif di media sosial.

Meskipun penelitian mengenai disinformasi politik dan kepercayaan publik telah banyak dilakukan, kajian yang secara khusus membahas pengaruh disinformasi politik di media sosial terhadap kepercayaan publik pada masyarakat pedesaan, khususnya perempuan, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara empiris pengaruh disinformasi politik di media sosial terhadap kepercayaan publik kepada pemerintah pada masyarakat perempuan Desa Lampegan, Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung. Hasil penelitian diharapkan



dapat memberikan kontribusi bagi kajian komunikasi politik dan kepercayaan publik serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam memperkuat komunikasi publik, meningkatkan literasi digital masyarakat, dan mengembangkan sistem verifikasi informasi yang lebih efektif.

TINJAUAN PUSTAKA

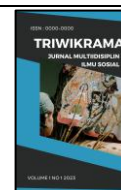
Penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar untuk mengetahui persamaan, perbedaan, dan posisi penelitian yang dilakukan. Suriadi (2025) menjelaskan bahwa disinformasi digital melalui media sosial dapat membentuk persepsi negatif terhadap pemerintah dan memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik. Kiratli (2023) menemukan bahwa penggunaan media sosial yang lebih tinggi berkaitan dengan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap Uni Eropa, terutama di wilayah dengan akses internet yang lebih luas dan cepat. Sementara itu, Kapantai et al. (2021) mengembangkan kerangka klasifikasi disinformasi untuk memahami karakteristik dan penyebarannya. Persamaan penelitian ini dengan kajian tersebut terletak pada pembahasan disinformasi, media sosial, dan kepercayaan publik. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang menguji pengaruh disinformasi politik di media sosial terhadap kepercayaan publik kepada pemerintah pada masyarakat Desa Lampegan Kecamatan Ibum.

Disinformasi politik merupakan perilaku menyebarkan informasi yang salah dan menyesatkan dengan tujuan tertentu, sehingga menjadi ancaman bagi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurut Suriadi (2025), disinformasi di media sosial dapat menyebabkan krisis legitimasi pemerintah dan menurunkan kepercayaan publik. Rambe et al. (2025) menyatakan bahwa disinformasi politik dapat membingungkan masyarakat dalam membedakan fakta dan pendapat serta memicu polarisasi sosial. Selain itu, Mulyadi dan Putri (2024) menjelaskan bahwa media sosial turut membentuk persepsi dan legitimasi politik masyarakat terhadap institusi pemerintah. Katili et al. (2025) menambahkan bahwa dalam era *post-truth*, persepsi masyarakat lebih dominan dipengaruhi emosi dan opini subjektif daripada fakta objektif. Kondisi ini menyebabkan masyarakat lebih mudah terpengaruh oleh informasi yang sesuai dengan persepsinya tanpa mempertimbangkan kebenarannya, sehingga dapat memperburuk kepercayaan terhadap pemerintah.

Teori Sistem Politik (*Grand Theory*) yang dikaji oleh Hanumanthappa (2023) memandang kehidupan politik sebagai sistem yang menerima masukan berupa tuntutan dan dukungan masyarakat, mengolahnya menjadi kebijakan, kemudian mengembalikannya melalui mekanisme umpan balik. Dukungan publik menjadi unsur penting dalam menjaga legitimasi dan stabilitas sistem politik. Dalam penelitian ini, penyebaran disinformasi politik di media sosial berpotensi membentuk persepsi negatif masyarakat Desa Lampegan Kecamatan Ibum terhadap pemerintah, sehingga dapat melemahkan dukungan publik dan menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Teori Kepercayaan Institusional (*Institutional Trust*) yang dikaji oleh Kiratli (2023) menjelaskan adanya hubungan negatif antara intensitas penggunaan media sosial dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Penelitian tersebut menemukan bahwa penurunan kepercayaan institusional lebih terasa di wilayah dengan infrastruktur internet yang maju dan penetrasi digital yang tinggi. Temuan ini menjadi dasar untuk memahami potensi hubungan antara paparan informasi di media sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Teori *Information Disorder* dari Kapantai et al. (2021) digunakan untuk menjelaskan gangguan informasi berdasarkan niat penyebaran, karakteristik konten, pelaku, dan proses penyebarannya. Teori ini menjadi landasan untuk menganalisis disinformasi politik di media sosial



sebagai variabel X. Sementara itu, Teori *Uses and Gratifications* dari Apuke dan Omar (2021) menjelaskan bahwa pengguna media sosial memilih dan menyebarkan konten berdasarkan kebutuhan informasi maupun interaksi sosial. Ketika kebutuhan tersebut tidak disertai kemampuan memverifikasi informasi, masyarakat lebih mudah menerima dan menyebarkan konten yang belum terbukti kebenarannya. Kondisi ini berpotensi memperluas penyebaran disinformasi politik dan memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kerangka pemikiran merupakan sintesis teori yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antarvariabel dan menjadi dasar penyusunan hipotesis (Sugiyono, 2023). Penelitian ini berfokus pada hubungan antara disinformasi politik di media sosial sebagai variabel X dan kepercayaan publik kepada pemerintah sebagai variabel Y. Kemudahan akses media sosial memungkinkan informasi menyebar dengan cepat, tetapi tidak semua informasi yang diterima masyarakat dapat dipastikan kebenarannya. Fenomena ini juga terjadi pada masyarakat Desa Lampegan Kecamatan Ibum, ketika informasi diterima dan disebarluaskan tanpa validasi sehingga dapat memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pemerintah.

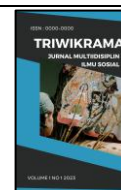
Kepercayaan publik merupakan keyakinan masyarakat terhadap pemerintah dalam menjalankan fungsi dan kebijakan publik serta berkaitan dengan dukungan masyarakat terhadap pemerintah. Paparan disinformasi yang terus berlangsung dapat menimbulkan kesalahpahaman, membentuk persepsi negatif, dan menurunkan kepercayaan publik. Suriadi (2025) menjelaskan bahwa disinformasi digital dapat menciptakan krisis legitimasi pemerintah. Nugroho et al. (2024) menemukan bahwa masyarakat yang terpapar disinformasi cenderung menolak kebijakan publik sebelum memahami isinya karena ketidakpercayaan terhadap sumber informasi. Rambe et al. (2025) menambahkan bahwa disinformasi politik dapat mempertajam perbedaan di tengah masyarakat dan menghambat dialog. Slavina et al. (2025) juga menegaskan bahwa dampak disinformasi lebih berat dirasakan oleh kelompok masyarakat dengan literasi digital terbatas, termasuk perempuan di wilayah pedesaan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan paradigma positivisme dengan pendekatan kuantitatif dan metode survei. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menguji pengaruh disinformasi politik di media sosial terhadap kepercayaan publik kepada pemerintah melalui data numerik yang dapat dianalisis secara statistik. Metode survei dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung dari responden melalui kuesioner yang disusun berdasarkan indikator variabel penelitian (Sugiyono, 2023).

Populasi dalam penelitian ini adalah perempuan yang berdomisili di Desa Lampegan, Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung, yang memenuhi kriteria sebagai pengguna media sosial dan pernah menerima informasi politik melalui media sosial. Sampel penelitian berjumlah 54 responden, yang ditentukan berdasarkan jumlah sembilan indikator penelitian dengan menggunakan pengali enam sesuai rumus Hair et al. (2021). Teknik pengambilan sampel menggunakan probability sampling dengan jenis simple random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota populasi untuk terpilih menjadi responden.

Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner yang disusun berdasarkan indikator variabel disinformasi politik di media sosial (X) dan kepercayaan publik kepada pemerintah (Y). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, dokumen resmi pemerintah, artikel jurnal, laporan penelitian, serta sumber digital yang relevan dengan topik penelitian.



Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dengan menggunakan skala Likert 1-5, yaitu skor 1 menunjukkan sangat tidak setuju dan skor 5 menunjukkan sangat setuju. Instrumen penelitian disusun berdasarkan dimensi dan indikator masing-masing variabel untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Teknik analisis data dilakukan melalui uji validitas dan reliabilitas instrumen, analisis deskriptif, uji normalitas, uji linearitas, dan regresi linear sederhana. Uji validitas menggunakan korelasi Product Moment Pearson untuk mengetahui ketepatan instrumen dalam mengukur variabel penelitian, sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi instrumen. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan data berdasarkan variabel penelitian. Selanjutnya, uji normalitas dilakukan untuk mengetahui distribusi data, sedangkan uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah hubungan antarvariabel bersifat linear. Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengukur pengaruh disinformasi politik di media sosial terhadap kepercayaan publik kepada pemerintah. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen serta koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lampegan, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Lokasi tersebut dipilih karena penggunaan media sosial di kalangan masyarakat perempuan mengalami peningkatan, tetapi belum sepenuhnya diimbangi dengan kemampuan literasi digital yang memadai dalam memilah dan memverifikasi informasi politik. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni hingga Juli 2026, mulai dari tahap pengumpulan data hingga pengolahan data penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Lampegan merupakan salah satu dari dua belas desa di Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang berlokasi di Jalan Oma Anggawisastra Nomor 265-269. Secara historis, Desa Lampegan merupakan desa induk yang dimekarkan pada tahun 1984 menjadi tiga desa, yaitu Desa Lampegan, Desa Karyalaksana, dan Desa Cibeet (Pemerintah Desa Karyalaksana 2023). Secara geografis, Desa Lampegan berada di kawasan perbukitan dengan ketinggian rata-rata sekitar 700 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, buruh pabrik, dan wiraswasta (BPS Kabupaten Bandung 2024). Secara administratif, desa ini terbagi menjadi empat dusun yang mencakup sebelas Rukun Warga (RW) dan sejumlah Rukun Tetangga (RT). Berdasarkan data Pemerintah Desa Lampegan, jumlah penduduk tercatat sebanyak 6.715 jiwa dalam 2.269 Kepala Keluarga (KK), terdiri atas 3.467 laki-laki dan 3.248 perempuan.

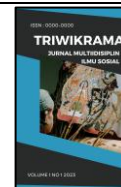
Karakteristik Responden

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Presentasi (%)
Riwayat Menerima Informasi Politik di Media Sosial	17-25 tahun	39	72,2
	26-35 tahun	7	13,0
	36-45 tahun	6	11,1
	> 45 tahun	2	3,7
Pendidikan terakhir	SD/Sederajat	0	0,0
	SMP/Sederajat	5	9,3

*Corresponding author

E-mail addresses: emailpenulis@gmail.com



	SMA/Sederajat	38	70,4
	Diploma/Sarjana	11	20,4
Platform Media	WhatsApp	48	88,9
Sosial yang Paling	Instagram	45	83,3
Sering Digunakan	TikTok	42	77,8
	Facebook	22	40,7

Sumber: Hasil Olah Data Kuesioner Peneliti, 2026.

Mayoritas responden (72,2%) berusia 17-25 tahun, diikuti kelompok usia 26-35 tahun (13,0%), 36-45 tahun (11,1%), dan di atas 45 tahun (3,7%). Komposisi ini menunjukkan bahwa responden didominasi kelompok usia muda yang umumnya aktif menggunakan media sosial dan terpapar informasi politik. Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas responden (70,4%) berpendidikan terakhir SMA/Sederajat, diikuti Diploma/Sarjana (20,4%) dan SMP/Sederajat (9,3%). Tidak terdapat responden dengan pendidikan terakhir SD/Sederajat. Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki latar belakang pendidikan menengah ke atas, yang relevan dengan kecenderungan menyebarkan informasi tanpa verifikasi.

WhatsApp menjadi platform yang paling banyak digunakan responden untuk mengakses informasi (88,9%), diikuti Instagram (83,3%), TikTok (77,8%), dan Facebook (40,7%). Dominasi WhatsApp dan Instagram menunjukkan bahwa kedua platform tersebut menjadi saluran penting bagi responden dalam memperoleh informasi, termasuk informasi politik yang belum tentu terjamin kebenarannya.

Hasil Pengujian Instrumen Penelitian

Hasil Uji Validitas

Uji validitas dilakukan menggunakan teknik korelasi Product Moment Pearson dengan membandingkan nilai r hitung dan r tabel sebesar 0,268 pada taraf signifikansi 5% dan derajat bebas 52. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh 15 butir pernyataan variabel Disinformasi Politik di Media Sosial (X) dan 12 butir pernyataan variabel Kepercayaan Publik kepada Pemerintah (Y) dinyatakan valid. Nilai r hitung pada variabel X berkisar antara 0,294-0,630, sedangkan variabel Y berkisar antara 0,643-0,839. Dengan demikian, seluruh 27 butir pernyataan dapat digunakan dalam pengumpulan data penelitian tanpa perlu menggugurkan butir pernyataan.

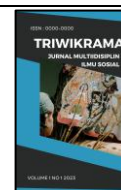
Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Variabel	Jumlah Item	Cronbach's Alpha	Keterangan
Disinformasi Politik di Media Sosial (X)	15	0,774	Reliabel
Kepercayaan Publik kepada Pemerintah (Y)	12	0,933	Reliabel

Sumber: Hasil Olah Data Kuesioner Peneliti, 2026.

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha variabel Disinformasi Politik di Media Sosial (X) sebesar 0,774 dan variabel Kepercayaan Publik kepada Pemerintah (Y)



sebesar 0,933. Kedua nilai tersebut berada di atas ambang minimum 0,60, sehingga kedua instrumen dinyatakan reliabel. Nilai Cronbach's Alpha variabel Y yang lebih tinggi menunjukkan konsistensi internal antarbutir pernyataan yang lebih kuat. Dengan demikian, kedua instrumen layak digunakan dalam penelitian dan data yang diperoleh dapat dianalisis lebih lanjut melalui analisis deskriptif dan pengujian hipotesis.

Hasil Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan kecenderungan jawaban responden terhadap setiap item pada kedua variabel penelitian. Skor rata-rata dikelompokkan menjadi lima kategori, yaitu sangat rendah (1,00-1,79), rendah (1,80-2,59), sedang (2,60-3,39), tinggi (3,40-4,19), dan sangat tinggi (4,20-5,00). Kategori interpretasi skor rata-rata tersebut diadaptasi dari Sugiyono (2023).

Deskripsi Variabel Disinformasi Politik di Media Sosial (X)

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa variabel Disinformasi Politik di Media Sosial (X) berada pada kategori tinggi dengan skor rata-rata 3,71. Empat dimensi berada pada kategori tinggi, yaitu Frekuensi Menerima Informasi Politik (4,10), Persepsi terhadap Informasi yang Belum Terverifikasi (4,05), Persepsi terhadap Informasi yang Tidak Sesuai Fakta (3,88), dan Persepsi terhadap Kredibilitas Sumber Informasi (3,85). Sementara itu, dimensi Perilaku Menyebarkan tanpa Verifikasi berada pada kategori sedang dengan skor 2,65. Temuan ini menunjukkan bahwa responden cukup banyak terpapar informasi politik di media sosial, tetapi relatif lebih jarang menyebarkan informasi tanpa verifikasi. Pola ini sejalan dengan Teori Information Disorder (Kapantai et al., 2021), yang memandang gangguan informasi berdasarkan paparan konten, karakteristik pelaku, dan proses penyebarannya.

Deskripsi Variabel Kepercayaan Publik kepada Pemerintah (Y)

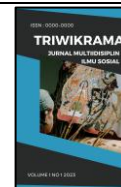
Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa variabel Kepercayaan Publik kepada Pemerintah (Y) berada pada kategori sedang dengan skor rata-rata 3,24, lebih rendah dibandingkan variabel Disinformasi Politik di Media Sosial (X) sebesar 3,71. Dimensi Kepercayaan terhadap Informasi Pemerintah memperoleh skor tertinggi sebesar 3,57 (kategori tinggi), sedangkan Kepercayaan terhadap Kebijakan Pemerintah (3,24), Integritas Pemerintah (3,19), dan Kepercayaan terhadap Kinerja Pemerintah (2,98) berada pada kategori sedang. Rendahnya skor kepercayaan terhadap kinerja pemerintah menunjukkan bahwa penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah masih perlu diperkuat. Temuan ini sejalan dengan Teori Kepercayaan Institusional (Kiratli, 2023), yang menekankan bahwa kepercayaan terhadap institusi terbentuk melalui evaluasi masyarakat terhadap kinerja nyata institusi tersebut.

Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

Uji	Nilai	Keterangan
Kolmogorov-Smirnov Z	0,080	Berdistribusi Normal
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200	Berdistribusi Normal

Sumber: Hasil Olah Data Kuesioner Peneliti, 2026



Uji normalitas dilakukan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov terhadap residual model regresi, dengan kriteria data berdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200, lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, data residual dinyatakan berdistribusi normal sehingga asumsi normalitas untuk analisis regresi linear sederhana telah terpenuhi.

Uji Linearitas

Tabel 4. Hasil Uji Linearitas

Sumber Variasi	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups (Combined)	1180,787	21	56,228	1,007	0,482
Linearity	400,705	1	400,705	7,178	0,012
Deviation from Linearity	780,082	20	39,004	0,699	0,798
Within Groups	1786,417	32	55,826		
Total	2967,204	53			

Sumber: Hasil Olah Data Kuesioner Peneliti, 2026

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel Disinformasi Politik di Media Sosial (X) dan Kepercayaan Publik kepada Pemerintah (Y). Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi *Deviation from Linearity* sebesar 0,798, lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hubungan kedua variabel dinyatakan linear sehingga asumsi linearitas untuk analisis regresi linear sederhana telah terpenuhi.

Analisis Regresi Linear Sederhana

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Model	B	Std. Error	t	Sig.
(Constant) - a	63,660	8,908	7,147	0,000
Disinformasi Politik (X) - b	-0,448	0,157	-2,849	0,006

Sumber: Hasil Olah Data Kuesioner Peneliti, 2026

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengukur pengaruh Disinformasi Politik di Media Sosial (X) terhadap Kepercayaan Publik kepada Pemerintah (Y). Hasil analisis menghasilkan persamaan regresi $Y = 63,660 - 0,448X$. Koefisien regresi bernilai negatif sebesar 0,448 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan skor disinformasi politik di media sosial diikuti oleh penurunan skor kepercayaan publik kepada pemerintah sebesar 0,448 satuan, dengan asumsi faktor lain tetap (*ceteris paribus*). Dengan demikian, hubungan antara kedua variabel menunjukkan arah negatif.



Hasil Pengujian Hipotesis

Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh disinformasi politik di media sosial terhadap kepercayaan publik kepada pemerintah secara parsial. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai t hitung sebesar -2,849 dengan signifikansi 0,006. Karena nilai $|t \text{ hitung}| (2,849) > t \text{ tabel} (2,007)$ dan signifikansi $(0,006) < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, disinformasi politik di media sosial berpengaruh signifikan negatif terhadap kepercayaan publik kepada pemerintah pada masyarakat perempuan Desa Lampegan Kecamatan Ibun

Uji F

Tabel 6. Hasil Uji F (ANOVA)

Sumber Variasi	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regresi	400,705	1	400,705	8,119	0,006
Residual	2566,499	52	49,356		
Total	2967,204	53			

Sumber: Hasil Olah Data Kuesioner Peneliti, 2026.

Uji F digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh disinformasi politik di media sosial terhadap kepercayaan publik kepada pemerintah secara simultan. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai F hitung sebesar 8,119 dengan signifikansi 0,006. Karena nilai F hitung $(8,119) > F \text{ tabel} (4,027)$ dan signifikansi $(0,006) < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, model regresi linear sederhana yang menempatkan disinformasi politik di media sosial sebagai prediktor kepercayaan publik kepada pemerintah adalah signifikan secara statistik.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 7. Hasil Koefisien Determinasi (Model Summary)

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,367	0,135	0,118	7,025

Sumber: Hasil Olah Data Kuesioner Peneliti, 2026.

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui proporsi variasi kepercayaan publik kepada pemerintah yang dapat dijelaskan oleh disinformasi politik di media sosial. Nilai R Square sebesar 0,135 menunjukkan bahwa disinformasi politik di media sosial mampu menjelaskan 13,5% variasi kepercayaan publik kepada pemerintah, sedangkan sisanya sebesar 86,5% dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian.

Temuan Implementasi Nilai-Nilai Gender dalam Menyikapi Disinformasi Politik

Item X15 pada indikator perilaku menyebarkan informasi tanpa verifikasi memperoleh skor rata-rata terendah sebesar 2,57 (kategori Rendah). Skor ini menunjukkan kecenderungan responden untuk tidak setuju dengan pernyataan tersebut, yang secara tentatif dapat dibaca sebagai indikasi sikap kehati-hatian dalam menyebarkan informasi politik. Namun, instrumen penelitian ini tidak dirancang dengan variabel gender tersendiri, sehingga temuan ini bersifat

*Corresponding author

E-mail addresses: emailpenulis@gmail.com



eksploratif. Berdasarkan tingkat pendidikan, kelompok Diploma/Sarjana memperoleh skor rata-rata 2,18, SMA/Sederajat 2,58, dan SMP/Sederajat 3,17. Sementara itu, berdasarkan usia, kelompok 36-45 tahun memperoleh skor tertinggi sebesar 3,17, sedangkan kelompok usia 17-25 tahun sebesar 2,59 dan 26-35 tahun sebesar 2,25. Perbedaan tersebut bersifat deskriptif dan merupakan indikasi awal, bukan hasil pengujian inferensial yang dapat digeneralisasi.

Temuan ini relevan dengan rendahnya keterwakilan dan partisipasi perempuan dalam ruang politik formal. Kehati-hatian dalam memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya merupakan salah satu bentuk literasi digital dan sikap kritis yang menjadi modal penting bagi partisipasi politik perempuan yang lebih aktif, meskipun tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah secara umum masih berada pada kategori Sedang.

PEMBAHASAN

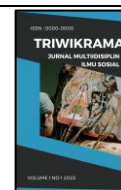
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat disinformasi politik di media sosial pada masyarakat perempuan Desa Lampegan Kecamatan Ibun tergolong Tinggi dengan skor rata-rata 3,71, sedangkan tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah tergolong Sedang dengan skor rata-rata 3,24. Hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa disinformasi politik di media sosial berpengaruh signifikan negatif terhadap kepercayaan publik kepada pemerintah, dengan koefisien regresi sebesar -0,448, nilai t hitung sebesar -2,849, dan signifikansi 0,006. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,135 menunjukkan bahwa disinformasi politik menjelaskan 13,5% variasi kepercayaan publik, sedangkan 86,5% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.

Temuan ini sejalan dengan kajian Suriadi (2025), yang menemukan bahwa disinformasi digital dapat membentuk persepsi negatif masyarakat terhadap lembaga pemerintahan dan memperdalam krisis kepercayaan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Slavina dkk. (2025), yang menemukan bahwa informasi yang beredar di media sosial memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Penelitian ini memperjelas bahwa disinformasi politik secara spesifik berpengaruh signifikan terhadap penurunan kepercayaan publik pada masyarakat perempuan di tingkat desa.

Secara teoretis, temuan ini relevan dengan Teori Kepercayaan Institusional (Kiratli, 2023), yang menjelaskan bahwa kepercayaan publik terbentuk melalui evaluasi terhadap kinerja, integritas, dan keterbukaan informasi institusi. Teori Information Disorder (Kapantai dkk., 2021) membantu memahami karakteristik konten dan proses penyebaran disinformasi politik, sedangkan Teori Uses and Gratifications (Apuke & Omar, 2021) menjelaskan aktivitas masyarakat dalam mengakses dan menyebarkan informasi politik melalui media sosial untuk memenuhi kebutuhan informasi, interaksi sosial, dan hiburan.

Ditinjau dari Teori Sistem Politik (Hanumanthappa, 2023), kepercayaan publik merupakan salah satu bentuk dukungan masyarakat terhadap sistem politik yang menjadi input bagi legitimasi pemerintahan. Tingkat kepercayaan publik yang berada pada kategori Sedang di tengah tingginya disinformasi politik dapat menjadi indikasi awal melemahnya dukungan masyarakat terhadap pemerintah desa apabila tidak ditangani.

Secara praktis, temuan ini menunjukkan pentingnya penguatan literasi digital perempuan di Desa Lampegan, khususnya dalam memverifikasi informasi politik sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Selain itu, pemerintah desa perlu meningkatkan komunikasi publik yang aktif dan transparan untuk menjaga kepercayaan masyarakat di tengah derasnya arus informasi di media sosial.



4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data mengenai pengaruh disinformasi politik di media sosial terhadap kepercayaan publik kepada pemerintah pada masyarakat perempuan Desa Lampegan Kecamatan Ibun, dapat disimpulkan bahwa tingkat disinformasi politik tergolong tinggi, sedangkan tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah tergolong sedang. Disinformasi politik di media sosial terbukti berpengaruh signifikan negatif terhadap kepercayaan publik kepada pemerintah, yang berarti semakin tinggi paparan dan penerimaan disinformasi politik, semakin rendah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Namun, pengaruh tersebut tergolong kecil, yaitu sebesar 13,5%, sedangkan 86,5% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian. Dari perspektif gender, perempuan Desa Lampegan menunjukkan kecenderungan berhati-hati dalam menyebarkan informasi politik tanpa verifikasi, dengan pola kehati-hatian yang cenderung lebih tinggi pada kelompok berpendidikan lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa literasi digital dan sikap kritis menjadi modal penting dalam memperkuat partisipasi politik perempuan di tingkat desa.

Berdasarkan hasil tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kepercayaan publik, seperti kinerja pelayanan pemerintah desa, literasi digital, dan intensitas komunikasi publik pemerintah. Penelitian juga dapat memperluas cakupan wilayah dan jumlah sampel serta menggunakan pendekatan campuran (mixed methods) atau desain longitudinal untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai hubungan kedua variabel. Pola kehati-hatian berdasarkan tingkat pendidikan dan usia juga dapat diuji lebih lanjut sebagai variabel moderasi, sedangkan pengukuran disinformasi politik dapat dilengkapi dengan indikator yang lebih objektif untuk mengurangi bias data self-report.

Secara praktis, Pemerintah Desa Lampegan dan instansi terkait disarankan meningkatkan komunikasi publik yang aktif dan transparan melalui kanal media sosial resmi serta memperkuat program literasi digital, terutama bagi kelompok yang membutuhkan peningkatan kemampuan verifikasi informasi. Masyarakat perempuan Desa Lampegan Kecamatan Ibun juga diharapkan menerapkan prinsip “Saring sebelum Sharing” dengan memeriksa kredibilitas sumber, membandingkan informasi dengan sumber resmi pemerintah, dan tidak langsung meneruskan informasi politik yang belum terverifikasi. Upaya tersebut diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif disinformasi politik serta menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

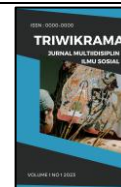
Buku

BPS Kabupaten Bandung. (2024). *Kecamatan Ibun Dalam Angka 2024*.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2021). *Multivariate Data Analysis* (8th ed.). Cengage Learning.

Hardani, N. H. A., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu.

Narimawati, U., Sarwono, J., Affandi, A., & Priadana, H. M. S. (2020). *Ragam Analisis dalam Metode Penelitian (Untuk Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*. Penerbit ANDI.



Pemerintah Desa Karyalaksana. (2023). *Sejarah Desa Karyalaksana*.

Rohman, M. M., Sinaga, J., Yuliawati, Asmara, A., Sari, T. P., Musa, Ramadhan, A. R., Yustitia, V., Agit, A., Suhendi, Hidayati, N., Dewi, N. P. S., Sukandi, P., Sumadinaga, P., & Saputri. (2023). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. PT Penamuda Media.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi Revisi). Alfabeta.

Artikel Jurnal

Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. (2023). Konsep umum populasi dan sampel dalam penelitian. *Jurnal Pilar*, 14(1), 15-31.

Apuke, O. D., & Omar, B. (2021). Fake news and COVID-19: Modelling the predictors of fake news sharing among social media users. *Telematics and Informatics*, 56, 101475.

Hanumanthappa. (2023). An overview of David Easton and the political system. *International Journal of Political Science*, 9(1), 14-16.

Hasanah, V. R., Firly, J., Jubaedah, Y., Saepudin, A., & Nudianti, D. (2025). Proses asesmen literasi bisnis pemasaran digital intervensi masyarakat untuk membangun ketahanan keluarga. *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 8(1), 42-54.

Kapantai, E., Christopoulou, A., Berberidis, C., & Peristeras, V. (2021). A systematic literature review on disinformation: Toward a unified taxonomical framework. *New Media & Society*, 23(5), 1301-1326.

Katili, A. Y., Gobel, S. A. M., & Usman, I. (2025). Komunikasi politik di era post-truth: Tantangan kredibilitas informasi publik di Indonesia. *Jurnal Pendidikan, Hukum, Komunikasi*, 1(3), 130-145.

Kiratli, O. S. (2023). Social media effects on public trust in the European Union. *Public Opinion Quarterly*, 87(3), 749-763.

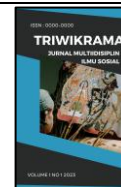
Miranti, D., Fauzy, N. M., In'am, M. M., Bastanjar, M. Q., & Nurizqi, I. Y. (2025). Pengaruh kepemimpinan perempuan terhadap pelayanan publik di Pemerintahan Desa Buninagara Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Politik*, 3(1), 1-10.

Mulyadi, & Putri, A. (2024). Strategi kampanye digital dalam peningkatan elektabilitas partai politik. *Jurnal Politik*, 2(1), 42-50.

Ningsih, A. Y., & Sasmita, S. (2025). Kepercayaan publik (*public trust*) kepada pemerintah dalam penanganan kerusakan jalan di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 7(1), 150-160.

Nugroho, R. A., Hidayati, K. N., Kawuri, K., Prakoso, S. G., Susiloadi, P., & Utomo, I. H. (2024). Perubahan persepsi masyarakat tentang informasi pemerintah di era pandemi COVID-19 pasca penyuluhan. *JPPM: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 8(3), 355-364.

Nurdiansyah, R. A. D., Pratama, R. C., Awfa, M. R., Marbun, A. A., Indriani, R., Barasa, A. M. F., Azzahra, N., Julianti, S. J., & Karolina, N. (2025). Peran media dalam memperkuat demokrasi: Antara informasi dan disinformasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 17571-17575.



- Nuridin, R. (2024). Trolls, disinformasi, dan strategi kampanye: Tantangan demokrasi digital dalam Pemilu 2024. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 6(1), 1-26.
- Qadir, A., & Ramli, M. (2024). Media sosial (definisi, sejarah dan jenis-jenisnya). *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 3(6), 2713-2724.
- Rambe, A., Ginting, R. R. M., Azzahra, Z., & Siregar, F. H. (2025). Pengaruh propaganda dan disinformasi tentang opini publik. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(1), 1235-1242.
- Suriadi, H. (2025). Krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik di era disinformasi digital. *Journal of Social, Education and Religious Studies*, 1(1), 45-52.
- Surtiani, A., Oktoriandar, A., Mulyanti, N. S., Hasanah, S., & Astuti, W. S. B. (2025). Keterlibatan perempuan dalam pemerintahan desa: Studi tentang peran PKK dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Gajah Mekar Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung. *Jurnal Politik*, 3(2), 49-57.
- Waruwu, M., Pu'at, S. N., Utami, P. R., Yanti, E., & Rusydiana, M. (2025). Metode penelitian kuantitatif: Konsep, jenis, tahapan dan kelebihan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(1), 917-932.

Sumber Elektronik

- Detikcom. (2022). Kabupaten Bandung tercatat paling rawan pelanggaran Pemilu se-Jabar. <https://www.detik.com/jabar/berita/d6481812/kabupaten-bandung-tercatat-paling-rawan-pelanggaran-pemilu-se-jabar> (Diakses 30 Juni 2026).
- Detikcom. (2023). 8 daerah di Jabar dengan indeks kerawanan Pemilu tertinggi, mana saja? <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7060250/8-daerah-di-jabar-dengan-indeks-kerawanan-pemilu-tertinggi-mana-saja> (Diakses 30 Juni 2026).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). KemenPPPA dorong keterwakilan perempuan dalam politik. <https://www.kemenpppa.go.id> (Diakses 15 Juni 2026).
- Mulya, F. P. (2025). Mafindo ungkap 1.593 kasus hoaks setahun terakhir, didominasi politik. ANTARA News. <https://www.antaranews.com/berita/5192149> (Diakses 9 Mei 2026).
- Yonatan, A. Z. (2025). Politikus jadi sumber hoaks utama 2025. GoodStats. <https://goodstats.id/article/politikus-jadi-sumber-hoaks-utama-2025-QbU5A> (Diakses 2 Mei 2026).